

NOTULEN SESI IV
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2019
JAKARTA, 25 – 27 MARET 2019

Tema :

“TRANSFORMASI DAN KESIAPAN PERHUBUNGAN DARAT UNTUK PENINGKATAN PROFESIONALISME KINERJA MENGHADAPI TANTANGAN DAN PELUANG ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”

Moderator :

Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

1. Renstra Perhubungan Darat 2015-2019 hanya tercapai 70%
2. Periode Renstra berikutnya agar memperbaiki capaian program, kedepan akuntabilitas intansi diurut dari bawah (IKU dengan Program nyambung)
3. Periode 2016 kebawah kita memiliki DAK bidang keselamatan, dikarenakan pengelolaannya tidak baik maka tidak diadakan lagi

Narasumber :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Mekanisme, Implementasi dan Pengawasan DAK Transportasi Darat

- a. DAK merupakan salah satu opsi pembiayaan pengelolaan transportasi di daerah;
- b. Kebijakan DAK untuk tahun 2020 sudah disepakati yaitu bidang Transpostasi Jalan dan Transportasi Perairan;
- c. Bapenas sedang merumuskan mekanisme dan kriteria pengalokasi DAK;
- d. Terkait strategi pengembangan infrastruktur tahun 2020-2024 masih menunggu kebijakan pimpinan terpilih sementara disiapkan naskah teknokratik.
- e. Penyediaan pelayanan Darat : keselamatan jalan.
- f. Bappenas mendorong integrasi pendanaan prioritas supaa tidak terjadi duplikasi;
- g. Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran tidak hanya bersumber pada APBN tapi bisa melalui KPBU maupun PINA;
- h. Dengan adanya UU 23 ada peralihan pengelolaan insfrastruktur Perhubungan dari pusat ke daerah, DAK dalam rangka untuk menanggulangnya;
- i. DAK masuk kedalam PN 2 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah dengan 5 Program Prioritas yaitu Perluasa Insfrastruktur Dasar, Penguatan Insfrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana, Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda, Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- j. Arahan kebijakan DAK guna mendorong pemenuhan pelayanan dasar, prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan, kesesuaian Kewenangan Daerah (UU23/2014), refocusing berdasarkan efektifitas, kinerja fisik dan ketersediaan data;
- k. Jenis DAK ada 3, yaitu regular, afirmasi dan penugasan
- l. DAK Reguler mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar
- m. DAK Afirmasi mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan pda daerah tertinggal, terluar, perbatasan
- n. DAK Penugasan mendukung tema prioritas nasional serta arahan presiden
- o. Kementerian Perhubungan masuk kedalam DAK Afirmasi dan penugasan dengan bidang Jalan dan Transportasi Laut/perairan;
- p. Pendanaan keselamatan jalan masuk kedalam Bidang Jalan pada sub bidang keselamatan jalan;
- q. DAK Pembangunan Transportasi SDP di daerah terpencil sempat diambil alih oleh Kemendes, apabila Kemenhub siap maka akan dikembalikan ke Kemenhub kembali;

- r. DAK Penugasan merupakan gabungan dari top down (prioritas) dan Bottom up (kebutuhan daerah) untuk prioritas pembangunan;
 - s. Bappenas dapat lebih focus membahas DAK melalui Musrembang;
 - t. DAK Keselamatan Jalan berjalan mulai 2011-2016, dikarenakan belum mampu mengoptimalkan alokasi DAK 2017-2019 hilang, dan mulai diusulkan kembali pada tahun 2020;
 - u. Arah Kebijakan DAK 2020 adalah membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keselamatan transportasi darat, dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan dengan mengurangi volume kecelakaan dan menurunnya fatalitas;
 - v. Target dan sasaran DAK adalah meningkatkan keselamatan dan menurunkan kecelakaan
 - w. DAK masuk kedalam PN 2 yaitu infrastruktur dan pemerataan wilayah dan PP1 yaitu perluasan infrastruktur dasar
 - x. Menu kegiatan DAK berupa pengadaan dan pemasangan Perlengkapan Jalan, pembangunan ZOSS dan RASS dengan lokasi KSN dan daerah dengan tingkat kecelakaan tinggi;
 - y. Kelembagaan DAK Sub Bidang Keselamatan Jalan dikoordinasikan Bappenas dan Kemenhub, pada tingkat provinsi Bappeda, Dishub dan BPTD, sementara pada tingkat kab/kota dilaksanakan oleh Bappeda dan Dishub;
 - z. Arah Kebijakan DAK Bidang Transformasi Laut/Perairan masuk kedalam DAK Afirmasi dan DAK Penugasan;
 - aa. DAK Bidang perairan dapat untuk pembanguann, peningkatan dan rehap pelabuhan serta pengadaan sarana transportasi perairan;
 - bb. DAK Bidang Transformasi Laut/Perairan masuk kedalam PN 2 yaitu Infrastruktur dan pemerataan wilayah dan PP 3 yaitu peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - cc. Time Line Pengusulan DAK, April pengusulan, Mei Verifikasi, Juli-Agustus Forum Sinkronisasi-Harmonisasi DAK;
 - dd. Kemenhub diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK melalui e-Monev DAK
 - ee. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian RK dengan prioritas nasional, kesesuaian RK dengan DPA Daerah, Kesesuaian RK yang ditetapkan dengan pelaksanaan;
 - ff. Dalam penyusunan Juknis perlu diperinci kewenangan masing-masing instansi terutama sejauh mana BPTD akan berperan dalam pelaksanaan DAK;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Persiapan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Hubdat Tahun 2020 - 2024

- a. Posisi penyusunan Renstra Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 saat ini dalam tahap penyusunan, kesempatan ini perlu penyesuaian antara kab/kota, provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. Ditjen Hubdat telah memulai penyusunan Renstra 2020-2024 sejak awal 2019
- c. Evaluasi capaian Renstra Hubdat hanya mencapai 72,58% dikarenakan alokasi anggaran hanya sebesar 21,7 Triliun dengan realisasi 20,3 Triliun dibawah rencana penganggaran sebesar 57,2 Triliun;
- d. Terdapat 12 isu strategis menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Hubdat 2020-2024 diantaranya transportasi perkotaan, perubahan iklim/mitigasi bencana, ODOL, alternative skema pendanaan, SDM dan Kelembagaan, Pembagian Kewenangan, Angkutan Sewa Khusus, Pemerataan Pembangunan, Klasterisasi Pengembangan Wilayah (KSPN, KEK/KI, 3T), Perkembangan IT, Kinerja Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Darat;
- e. Dalam penanganan infrastruktur KSPN, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan 10 Destinasi Wisata Prioritas, KSPN lain yang tidak masuk 10 Destinasi Wisata Prioritas juga harus tetap diperhatikan;
- f. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Kewenangan Terminal B dan C menjadi kewenangan Pemda, akan tetapi apabila Pemda mengalami keterbatasan anggaran guna pembangunannya dapat mengusulkan ke pusat melalui mekanisme hibah;

- g. Pengusulan kegiatan pembangunan hendaknya memperhatikan kajian teknis sehingga bukan hanya output yang tercapai tapi nilai kemanfaatan dan outcome dapat tercapai;
- h. Penanganan Keselamatan Transportasi Darat tidak bida ditangani oleh Perhubungan saja tapi perlu instansi terkait
- i. Arah Kebijakan Ditjen Hubdat pada RPJMN 2020-2024 diantaranya Konektivitas Nasional, Dukungan Pengembangan Kawasan (KSPN, KEK/KI dan K3T), Keslamatan Transportasi Darat, Revitalisasi Angkutan Perkotaan dan Revitalisasi ANgkutan Sungai Danau;
- j. Arah Kebijakan Konektivitas Nasional berupa Pengembangan Simpul-simpul Terminal Tipe A, Pengembangan Simpul-simpul Terminal Barang Nasional, Pengembangan Simpul Pelabuhan Penyeberangan, Penyediaan Layanan AKAP dan Penyeberangan dan Penyediaan Layanan Angkutan Lanjutan (AKDP,Angkutan Perkotaan);
- k. Arah Kebijakan Dukungan Pengembangan KSPN, KEK,
- l. Arah kebijakan Keselamatan Transportasi Darat berupa pengembangan UPPKB, dan pengawasan ODOL diluar UPPKB, pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan, Perbaikan LRK ZOSS dan RASS, Peertiban Uji Tipe
- m. Revitaliasai Angkutan Perkotaan berupa Pembelian Layanan Angkutan Masal, MRLL, Penyediaan Halte;
- n. Revitalisasi Angkutan Sungai Danau berupa Pengembangan Simpul-simpul SDP, Pengembangan Fasilitas Keselamatan Pelayaran, Peningkatan Pengawasan dan operasional serta sosialisai Keselamatan Pelayaran di SDP;
- o. PM 122 merupakan masa transisi keselamatan sungai danau, setelah 6 bulan Perhubungan Laut akan melimpahkan kewenangan keselamatan Sungai Danau kepada Ditjen Hubdat secara penuh;
- p. Alternatif Pendanaan tidak hanya berfokus pada Rupiah Murni, tapi bisa juga melalui KPBU dan PINA, SBSN, dan DAK
- q. Terminal bukan hanya tempat naik turun penumpang, tapi sebagai tempat pemeriksaan sehingga setiap kendaraan yang keluar dari terminal sudah laik jalan;
- r. Alokasi DAK sebaiknya bukan hanya untuk Perlengkapan Jalan, tapi bisa juga untuk pendanaan terminal sebagai upaya peningkatan keselamatan;
- s. Dalam hal pengusulan program, selektivitas Daerah juga diperlukan sehingga penyusunan program bisa selaras dengan Pusat;
- t.

Diskusi :

No	Penanya (Nama/Instansi)	Pertanyaan	Tanggapan
	RENSTRA		
1.	Bpk. Salahan Kadishub Kab Batubara	<p>Kami melihat tanggung jawab Daerah sangat banyak, namun anggarannya belum besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mohon Kab Batubara dapat diprioritaskan dalam pengalokasian DAK 2. Terkait SDM, tamatan STTD pada Kab Batubara hanya 2 orang, mohon untuk kebutuhan SDM dipenuhi 3. PKB mohon pemenuhan SDM yang berkompetensi untuk PKB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi anggaran, dengan adaya DAK, secara garis besar ada Pembangunan, Peyelenggaraan dan pengelolaan dimana berdasarkan UU 23 ada kesempatan pembangunan dilaksanakan oleh pusat melalui mekanisme yang ada; 2. Terkait pemenuhan SDM akan dikorrdisasikan lebih lanjut dengan BPSDM Perhubungan; 3. Terdapat beberapa cara

			<p>memenuhi kebutuhan kompetensi di bidang PKB, seperti dari Diklat yang dilaksanakan BPSDM Perhubungan;</p>
2.	Justin Sitorus Dishub Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dana DAK memungkinkan untuk pendanaan Kendaraan Operasional; 2. mengingat Papua aka menjadi tuan rumah PON 2020, fasilitas pendukung keselamatan diharapkan menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran 3. bencana banjir bandang, banyak fasilitas yang rusak 4. ada pembangunan halte sungai tapi fasilitas keselamatan lainnya belum ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dak perhubungan Darat telah dialokasikan oleh Bapennas untuk Tahun 2020 2. Dukungan PON 2020 telah menjadi prioritas kemenhub tahun 2020 dan sudah dikoordinasikan kepada semua sub sektor 3. Dapat diusulkan melalui mekanisme DAK Tahun 2020 4. Dapat diusulkan melalui mekanisme DAK Tahun 2020
3.	Burani Dishub Bengkulu Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengaktian DAK lagi, kalau tanpa alokasi DAK anggaran di daerah tidak akan seimbang; 2. terkait ODOL, perlu regulasi yang diskresi, karena di daerah saat bertindak perlu bersama Polisi, Pembangunan terminal tipe B dan C bisa dilaksanakan oleh pusat, tapi untuk pengoperasian dikembalikan ke daerah, mohon alokasi anggaran untuk pengoperasian terminal; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dak perhubungan Darat telah dialokasikan oleh Bapennas untuk Tahun 2020; 2. Telah disusun konsep MOU antara Ditjen Hubdat dengan <i>Stakeholder</i> terkait untuk penanganan ODOL
4	Yulia Teresia Dishub Sanggau, Kalbar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum menemukan IKU Kemenhub 2020-2024, mohon IKU kemenhub dapat disampaikan agar dapat kami jabarkan dalam Renstra Daerah 	<p>IKU Kemenhub sedang difinalisasi posisi masih naskah teknokratik, menyesuaikan visi misi pemerintah periode selanjutnya</p>
	DAK		
5	Sigit Dishub Maluku Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. DAK Sub Bidang Keselamatan Jalan masuk kedalam DAK Bidang Jalan, dimana DAK bidang Jalan diampuh oleh Dinas PU, perlu inangisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan menu dan kriteria pembagian bidang DAK sesuai dengan peraturan yang berlaku

		<p>lebih insentif agar pelaksana DAK Sub Bidang Keselamatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk alokasi PKB mohon diprioritaskan mengingat kami Kabupaten Baru 3. Pengalokasi DAK melalui serangkaian perencanaan teknis, mohon kami diprioritaskan untuk 2020 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pendukung kesiapan teknis pengujian di daerah, telah masuk indikasi menu DAK bidang keselamatan jalan 3.
	Dishub Propinsi Sultra	Butuh prioritas keselamatan jalan daerah melalui DAK dan dana dekonsentrasi yang dibagikan;	Bappenas memang ada dana Dekonsentrasi, tetapi itu kembali kepada kebijakan Kementerian Perhubungan;
	Dishub Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mohon dapat di prioritaskan untuk pembangunan terminal tanjung puting 2. Dermaga penyeberangan sungai di Kotawaringin Barat 	Usulan ditampung untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti pada kesempatan pertama.
	Sulistyo Dishub Kabupaten Kebumen	Taman Geopark di Kebumen jika 2 tahun tidak ada penanganan akan dicabut, bagaimana alur perencanaan pengusulan untuk penanganan taman nasional geopark Kab. Kebumen	<p>Dinas Kabupaten mengusulkan usulan ke Propinsi untuk di verifikasi, selanjutnya provinsi mengusulkan ke pusat untuk dialokasikan sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran</p> <p>Untuk intern Kementerian Perhubungan telah melakukan mekanisme pengusulan melalui e-Planning. Pemda dapat berpartisipasi melalui pengusulan kepada sub sektor Perhubungan Darat.</p>

Jakarta, Maret 2019

NOTULEN

1.

2.